

**PENGARUH ANGGARAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP KEMISKINAN DI
INDONESIA TAHUN 2011-2019**

SKRIPSI

Oleh:

Sita Anggraini

NIM. 51153107

Program Studi

Ekonomi Islam



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**PENGARUH ANGGARAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP KEMISKINAN DI
INDONESIA TAHUN 2011-2019**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) Pada Program Studi Ekonomi Islam*

OLEH:

Sita Anggraini

NIM. 51153107



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sita Anggraini

NIM : 51153107

Tempat/Tgl Lahir : Purwosari, 03 September 1997

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dusun XI Emplament Gg. Aridho 4

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH ANGGARAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2011-2019”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 29 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan

Sita Anggraini

NIM. 51153107

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

PENGARUH ANGGARAN PKH DAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2011-2019

Oleh :

Sita Anggraini

NIM. 51153107

Dapat disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Islam (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Islam

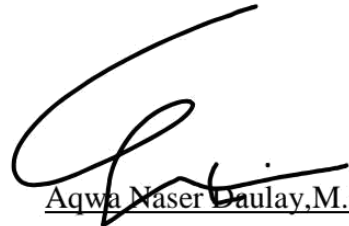
Medan, 26 Maret 2021

Pembimbing I



Dr. Isnaini Harahap, M.AG
NIP. 19750720 200312 2 002

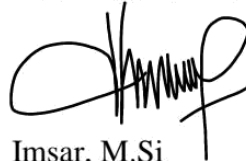
Pembimbing II



Aqwa Naser Daulay, M.Si
NIDN.2024128801

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Imsar, M.Si
NIP. 19760126 2200312 2 003
NIDN. 2003038701

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “PENGARUH ANGGARAN DAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2011-2019”, a.n Sita Anggraini, NIM. 51153107, Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara pada tanggal 31 maret 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 14 April 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam

Ketua


Imsar, M.Si
NIDN. 2003038701

Sekretaris

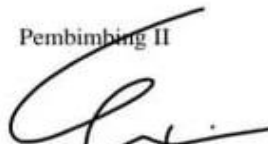

Rahmat Daini Harahap, M. Ak
NIDN. 0126099001

Anggota

Pembimbing I


Dr. Iswaini Harahap, MA
NIDN. 2020077503

Pembimbing II


Aqwa Naser Datulay, M.Si
NIDN. 2024128801

Penguji I


Imsar, M.Si
NIDN. 2003038701

Penguji II


Rahmi Syahriza, S.Th.I. MA
NIDN. 2003018501

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Sita Anggraini, 51153107, *Pengaruh Anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2011-2019* Penelitian ini dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I oleh Ibu Isnaini Harahap, MA dan Pembimbing Skripsi II oleh Bapak Aqwa Naser Daulay, M.Si.

Kemiskinan merupakan permasalahan negara yang paling rumit yang dihadapi setiap negara. kemiskinan justru semakin bertambah dengan semakin rendahnya kemampuan daya beli masyarakat. Dalam rangka pengentasan kemiskinan serta pemerataan ekonomi, maka pemerintah membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah dirumuskan kemudian diimplementasikan melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dibawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia. Berbagai macam program telah dilakukan salah satunya adalah melalui program PKH dan KUR. Telah dijelaskan bahwa program PKH dan KUR ini sangat berpengaruh dalam mengurangi angka kemiskinan. Namun dari data yang diperoleh dari BPS dan Kemensos terdapat ketidaksesuaian data dengan teori. Karena itu tujuan dari penelitian ini adalah: 1. untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh anggaran PKH terhadap Kemiskinan di Indonesia; 2. Untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Kemiskinan di Indonesia; 3. Untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara simulatan terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan metode yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda dengan data *time series*. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diterbitkan oleh BPS Sumatera Utara dan Kemensos 2011-2019. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yaitu dengan menggunakan *Eviews 8*. Berdasarkan hasil uji t pada Anggaran PKH diperoleh nilai probabilitas $0.00 < 0.05$ maka artinya Anggaran PKH memiliki pengaruh yang signifikan bagi kemiskinan. Uji t Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga diperoleh nilai probabilitas $0.00 < 0.05$ maka artinya Anggaran PKH memiliki pengaruh yang signifikan bagi kemiskinan. Hasil uji F juga menunjukkan Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimana $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ yaitu $408.7357 > 3.28$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Artinya secara bersama-sama Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara simultan berpengaruh terhadap variabel kemiskinan dengan nilai probabilitas $0.00 < 0.05$. Artinya bahwa variabel kemiskinan terhadap Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sesuai dan memiliki arti.

Kata Kunci : Anggaran PKH, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kemiskinan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wataa'la yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan, kemudahan, kelapangan, serta semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2011-2019”**. Serta tak lupa Salawat beriringkan salam penulis ucapkan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu'alaihi wassalam sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Selama penulisan skripsi ini banyak sekali ujian ataupun hambatan dan segala masalah yang penulis jadikan semangat untuk terus menyelesaikan skripsi ini. Dengan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua Orang tua saya, Ayahanda Tamsino Afandi dan Ibunda Siti Khadijah Saragih yang menjadi salah satu penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan motivasi, semangat, kasih sayang, serta Doa yang tiada henti yang selalu diberikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Imsar, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

5. Bapak Rahmat Daim Harahap, M. Ak selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Isnaini Harahap, M.AG selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan juga sekaligus Penasehat Akademik yang sangat baik sekali kepada saya dan selalu memberikan bimbingan dan juga masukan dalam proses pengerjaan skripsi ini, dimana dalam pengerjaan ini kondisi berbeda dari sebelumnya karena dimasa Covid-19.
7. Bapak Aqwa Naser Daulay, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang sangat baik sekali telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan baik dalam hal memberikan bimbingan dan juga masukan serta arahan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Begitupun Segenap staf dan dosen lainnya serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang juga telah memberikan semangat serta dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
9. Kepada Riza Nurul Aulia, S.E yang sangat banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang banyak memberi masukan serta arahan sehingga peneliti bisa menyusun skripsi ini dengan baik.
10. Kepada teman-teman dekat saya Yuni gendut, Jauza, Mariah, Ulfa yang selalu menemani dalam menyusun skripsi ini, terimakasih tidak pernah bosan dalam menemani saya untuk menyelesaikan skripsi ini, dan semoga kalian juga cepat nyusul ya.
11. Untuk orang spesial yang selalu menemani saya, terimakasih telah memberikan support dan semangat disaat saya ingin nyerah, namun tetap memberikan saya semangat.
12. Kepada teman – teman seangkatan EKI-B 2015 yang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, Terimakasih untuk dorongan serta semangat yang kalian lontarkan,

dan terimakasih juga atas pertemanan yang telah terjalin selama 5 tahun ini, semoga kita semua bisa sukses sesuai tujuan kita masing-masing.

Semoga Rahmat dan Hidayah-Nya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Dan penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran sangat membangun dalam menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membantu dan berguna bagi pembaca dan pihak yang membutuhkannya. *Aamiin Ya Rabbal 'Alaamiin..*

Medan, 29 Maret 2021

Sita Anggraini
NIM. 51153107

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Kemiskinan.....	13
1. Definisi Kemiskinan	13
2. Dimensi dan Indikator Kemiskinan	16
B. Program Pengentasan Kemiskinan	20
1. Program Keluarga Harapan (PKH).....	21
2. Penerima PKH	22
3. Hak Peserta PKH	23
a. Hubungan Anggaran PKH dan Kemiskinan.....	23
4. Kredit Usaha Rakyat.....	24
a. Hubungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kemiskinan.....	27
C. Penelitian Terdahulu.....	27
D. Kerangka Pemikiran	30
E. Hipotesis	31

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Populasi dan Sampel.....	34
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Definisi Operasional Variabel	36
G. Teknik Analisis Data	38
a. Uji Deskriptif	39
b. Uji Asumsi Klasik.....	39
1. Uji Normalitas.....	39
2. Uji Multikolinearitas	39
3. Uji Heterokedastisitas	40
4. Uji Autokorelasi	40
b. Regresi Linear Berganda.....	41
c. Uji Hipotesis	42
1. Uji Parsial (uji t).....	42
2. Uji Simultan/ Uji Statistik F.....	42
3. Koefisien Determinasi (R^2).....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Indonesia dan Kemiskinan di Indonesia	44
1. Kependudukan	46
2. Kondisi Pendidikan.....	47
3. Kondisi Kesehatan	48
4. Ekonomi Masyarakat Indonesia	48
B. Deskripsi Data Penelitian	49
C. Uji Asumsi Klasik	52
1. Uji Normalitas	52
2. Uji Multikolinearitas.....	52
3. Uji Heterokedastisitas.....	53

4. Uji Autokorelasi	53
D. Uji regresi Linear Berganda	54
E. Uji Hipotesis	56
1. Uji Parsial (uji t)	56
2. Uji Simultan/ Uji Statistik F	58
3. Koefisien Determinasi (R^2)	59
F. Pembahasan	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2011-2019.....	3
Tabel 1.2 Daftar Program Kerja Pemerintah Mengatasi Kemiskinan	5
Tabel 1.3 DataAnggran PKH Tahun 2011-2019.....	6
Tabel 1.4 Data kredit Usaha Rakyat (KUR)	8
Tabel 1.5 Tabulasi Data	8
Tabel 2.1 Dimensi dan Indikator Kemiskinan	19
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	37
Tabel 4.1 Data Quartal	49
Tabel 4.2 Deskripsi Data Penelitian.....	51
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas	52
Tabel 4.4 Uji Heterokedastisitas	53
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi.....	53
Tabel 4.6 Hasil Regres Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	54

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
4.1 Peta Indonesia	45
4.2 Jumlah Penduduk Indonesia.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan, bagaimana tidak, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian negara Indonesia.

Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga Negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar Negara warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Ada 3 persoalan yang sangat krusial dalam kemiskinan yaitu:

1. Pergulatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
2. Tersendat-sendatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anaknya,
3. Terbatasnya akses mereka terhadap jaminan kesehatan.¹

Kemiskinan merupakan permasalahan negara yang paling rumit yang dihadapi setiap negara. kemiskinan justru semakin bertambah dengan semakin rendahnya kemampuan daya beli masyarakat.² Sebagai Negara berkembang, fenomena kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang hangat dibahas dan harus diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Isu kemiskinan masih menjadi permasalahan yang cukup menarik di negeri ini. Masalah kemiskinan lebih cenderung merupakan suatu masalah kebijakan politik yang berkaitan dengan masalah kebijakan pembangunan

¹Hendra Harmain, Muhammad Ramadhan, dan Aqwa Naser Daulay, *Managemen Keuangan Keluarga Secara Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga NelayanPesisir PantaiIndonesia*, 2019, h. 51

²Marliya. “ *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu*” (Jurnal Katalogis, Volume 1 Nomor2, Februari 2013), h. 77

pada umumnya (di segala bidang), baik di level atas maupun di level bawah. Dalam hal kebijakan pembangunan, tampak jelas lemahnya atau ketidakberdayaan posisi masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin atau lapis bawah (grass roots) dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan yang harus diselesaikan bersama.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 disebutkan bahwa kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai jumlah penduduk miskin (juta jiwa), ketidak mampuan ekonomi, tetapi kemiskinan juga dipahami menyangkut kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh Negara-negara yang sedang berkembang di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan bagi warga negaranya. Adapun langkah nyata yang dilakukan adalah melalui penerbitan kebijakan pemerintah melalui dokumen peraturan perundang-undangan yang mendukung pengentasan kemiskinan yang kemudian dituangkan ke dalam program-program pengentasan kemiskinan.

Pada negara indonesia, salah satu karakteristik kemiskinan di Indonesia adalah perbedaan yang begitu besar antara nilai kemiskinan relatif dan nilai kemiskinan absolut dalam hubungan lokal dengan geografisnya. Apabila dalam pengertian absolut lebih dari setengah jumlah total penduduk indonesia yang hidup miskin berada di pulau jawa, dalam pengertian relatif provinsi-provinsi di indonesia timur menunjukkan nilai kemiskinan yang tinggi. Di indonesia dari 34 provinsi, ada 16 provinsi yang memiliki angka kemiskinan di atas angka nasional. Dan lima provinsi yang memiliki angka kemiskinan terbesar berada di kawasan timur Indonesia. Adapun provinsinya adalah sebagai berikut:

1. Papua (27,53%),

2. Papua Barat (22,17%),
3. Nusa Tenggara Timur (21,09%),
4. Maluku (17,69%), dan
5. Gorontalo (15,52%).

Dan adapun di pulau jawa, provinsi yang memiliki angka kemiskinan di atas angka nasional terdapat di DIY Yogyakarta peringkat ke 12 dengan angka kemiskinan 11,7%. Jawa tengah peringkat ke 15 dengan angka kemiskinan 10,8% sedangkan Jawa Timur di peringkat ke 16 dengan angka kemiskinan 10,37%. Provinsi yang memiliki angka kemiskinan terendah adalah DKI Jakarta sebesar 3,47% dan Bali sebesar 3,79%.³

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi di berbagai provinsi dengan posisi tertinggi oleh provinsi Papua sebesar 27.53%. Karena itu pemerintah harus mengambil kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Selain data diatas, juga ada data yang peneliti dapat dari situs resmi Badan Pusat Statistik Indonesia yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah dan Persentase Penduduk miskin 2011-2019

Tahun	Jumlah Jiwa /Juta Jiwa	Persentase (%)
2011	30,01	12,36%
2012	28,71	11,66%
2013	28,60	11,46%
2014	27,73	10,96 %
2015	28,51	11,13 %
2016	27,76	10,70 %
2017	26,58	10,12 %

³Data Boks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/16/provinsi-mana-yang-memiliki-angka-kemiskinan-terbesar/> diunduh tgl 28/1/2021 pk. 23.35 WIB

2018	25,67	9,66 %
2019	24,79	9,22 %

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa angka kemiskinan menunjukkan penurunan angka kemiskinan dari tahun 2011-2014, begitupun tahun 2016-2019, namun di tahun 2015 angka kemiskinan meningkat menjadi 11,13% . angka ini cukup tinggi. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari situs beritasatu.com, dijelaskan bahwa peningkatan kemiskinan ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah sehingga tidak mampu menyerap angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja. Alhasil, pengangguran meningkat yang membuat angka kemiskinan juga membengkak.⁴

Setelah melihat tabel yang telah dipaparkan sebelumnya, bisa dikatakan bahwa penurunan kemiskinan belum optimal karena penurunan angka kemiskinan berjalan lamban dari tahun-tahun sebelumnya. Dan masih ada peningkatan kemiskinan yang terjadi. Dari kedua data yang peneliti dapat, bisa disimpulkan bahwa adanya kelambanan penurunan tingkat kemiskinan dan itu terlihat dari data BPS 2011 ke 2019 yang disajikan.

Pemerintah Indonesia membuat segala upaya dalam mengatasi kemiskinan salah satunya pemerintah indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka pengentasan kemiskinan serta pemerataan ekonomi, maka pemerintah membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah dirumuskan kemudian diimplementasikan melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dibawah *koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia*. Berbagai macam program telah dilaksanakan salah satunya adalah sebagai berikut:

⁴Tri Listiyarini, *Ini Penyebab Angka Kemiskinan RI Meningkat*, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/338515/ini-penyebab-angka-kemiskinan-ri-meningkat/>
Diunduh tgl. 13/04/2021/ Pkl. 14.28 Wib

Tabel 1.2
Daftar Program Kerja Pemerintah Mengatasi Kemiskinan

Nama Program	Strategi Program
Program Keluarga Harapan (PKH)	Alokasi dana sebesar Rp 5,2 triliun, cakupan PKH ditingkatkan menjadi 3,2 juta Rumah Tangga dari 2,4 juta Rumah Tangga pada 2013 serta bantuan PKH juga dinaikan menjadi Rp 1,8 juta /Rumah Tangga Sangat Miskin/Tahun dari Rp 1,4 juta di 2013.
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Alokasi dana Rp 2,2 triliun. Menurutnya program KUR ini berfungsi meningkatkan dan memperluas akses permodalan bagi koperasi dan Usaha Kecil Menengah bagi masyarakat kurang mampu sehingga akses mendapatkan KUR akan semakin dipermudah untuk tahun depan.

Sumber : Berita Satu Media Holdings

Kedua program diatas merupakan salah satu program yang difokuskan peneliti dalam penelitian ini yaitu program PKH dan KUR. Dimana program PKH merupakan program pemberdayaan sebab program ini betul-betul memberikan akses kepada anggota masyarakat yang tidak berdaya. Dikatakan juga bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin. Tujuannya adalah:

1. Meningkatkan taraf hidup dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga
3. Menciptakan perubahan perilaku kemandirian KPM
4. Mengurangi kesenjangan dan kemiskinan⁵

⁵Kiki Zakiah, et.,all., *Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Kesejahteraan Sosial (lanjut Usia dan Disabilitas Berat Di Indonesia)*, dalam Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, 2020, h. 4

Berdasarkan keterangan diatas jelas bahwa program PKH merupakan program yang dibuat pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Dibawah ini adalah dana anggaran PKH sebagai berikut:

Tabel 1.3
Dana Anggaran PKH Tahun 2011-2019

Tahun	Anggaran PKH (triliun Rupiah)
2011	1.282
2012	1.967
2013	3.536
2014	5.548
2015	6.471
2016	7.795
2017	11.34
2018	17.317
2019	34.40

Sumber: Kementerian Sosial

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa dana anggaran PKH selalu mengalami peningkatan, dan seperti teori yang dikatakan sebelumnya bahwa program ini salah satu program untuk mengurangi atau mengatasi kemiskinan. seharusnya jika ini dijadikan salah satu program pengentasan kemiskinan, ini bisa menurunkan tingkat kemiskinan di indonesia, namun ini tidak. Data kemiskinan mengalami peningkatan di tahun 2015 dan angka kemiskinan masih terbilang tinggi.

Sedangkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas dalam mendukung kebijakan pemberian kredit/ pembiayaan kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah. KUR juga merupakan kredit/ pembiayaan modal kerja atau investasi, diberikan kepada debitur, individu/ perseorangan badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Pemerintah membuat program KUR ini adalah untuk mendorong terciptanya para wirausahawan. Program ini dibuat dalam rangka pengentasan kemiskinan serta pemerataan ekonomi, maka pemerintah mendorong terciptanya para wirausahawan. Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap usaha mikro kecil dan menengah tersebut adalah melalui KUR.⁶

Dalam teori lain dijelaskan bahwa tahun 2007 pemerintah Indonesia membuat sebuah terobosan baru untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi rakyat miskin yaitu melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).⁷ Hal ini juga ditegaskan dalam jurnal ekonomi bahwa program KUR lahir sebagai respon dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya bidang Reformasi Sektor Keuangan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum Of Understanding /MoU*) antara pemerintah Lembaga Penjaminan dan Perbankan pada tgl 9 Oktober 2007 sebagaimana diubah dengan *addendum* pada tanggal 14 mei 2008 Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi atau yang sering disebut dengan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui program ini, pemerintah mengharapkan adanya akselerasi/percepatan pengembangan kegiatan perekonomian terutama pada sektor riil, dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.⁸ Dibawah ini adalah data Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperoleh dari BPS yaitu total kredit yang dipergunakan untuk UMKM dalam mengatasi kemiskinan. Adapun datanya adalah sebagai berikut :

⁶A. Heri Susanto, *KUR*, <http://kur.ekon.go.id/pentingnya-keuangan-inklusif-dalam-pengentasan-kemiskinan-dan-pemerataan-ekonomi-melalui-kredit-usaha-rakyat-kur/> diunduh tgl 20/12/2020 Pkl. 07.00 WIB

⁷Nining I. Soesilo, *Keuangan Mikro Indonesia*, (Jakarta: UKM Center FEUI, 2017), h. 109

⁸Roza Gustika, *Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Masyarakat Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman*, Dalam e-jurnal Apresiasi Ekonomi, ISSN: 2337- 3997, Vol 4 No.2, Maret 2016, h.107-108

Tabel 1.4
Data Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Tahun	Total Kredit (triliun Rupiah)
2011	458.16
2012	526.4
2013	610.03
2014	671.72
2015	739.8
2016	856.96
2017	942.39
2018	1032.64
2019	1098.14

Sumber :BPS Indonesia

Berdasarkan tabel 1.4 diatas, menunjukkan bahwa total kredit selalu menunjukkan peningkatan disetiap tahun, dan seperti yang dijelaskan sebelumnya dengan adanya pembiayaan kredit ini bisa mendorong usahawan untuk berwirausaha karena ini dapat mengatasi kemiskinan.

Berdasarkan keseluruhan data yang didapat peneliti, dan untuk mempermudah memahami data, maka peneliti mencoba membuat tabulasi data sebagai berikut:

Tabel 1.5
Tabulasi Data

Tahun	Anggaran PKH (Trilliun Rupiah)	KUR (trilliun Rupiah)	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)
2011	1.282	458.16	30.01
2012	1.967	526.4	28.71
2013	3.536	610.03	28.6

2014	5.548	671.72	27.73
2015	6.471	739.8	28.51
2016	7.795	856.96	27.76
2017	11.34	942.39	26.58
2018	17.317	1032.64	25.67
2019	34.4	1098.14	24.79

Sumber : Diolah

Berdasarkan tabulasi diatas, peneliti menjelaskan beberapa latar belakang masalah yang peneliti temukan. Dimana latar belakang masalah itu akan dijabarkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa PKH merupakan salah satu program yang dibuat pemerintah untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan. Karena itu anggaran dari PKH sangat dibutuhkan dan dengan anggaran tersebut bisa mengurangi kemiskinan. Berdasarkan data anggran PKH yang didapat peneliti, menunjukkan bahwa anggaran PKH selalu ditingkatkan pemerintah, dan sesuai teori bahwa PKH bisa mengurangi kemiskinan, harusnya dengan adanya PKH ini bisa mengurangi kemiskinan pada tahun 2015, namun dari data kemiskinan, tahun 2015 terjadi peningkatan angka kemiskinan.
2. Telah dijelaskan juga sebelumnya bahwa KUR juga merupakan salah satu program yang dibuat pemerintah dalam menngentaskan kemiskinan. Karena diyakini bahwa dengan adanya KUR mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang salah satunya adalah dari UMKM. Dan hal ini akan menambah pendapatan masyarakat miskin di indonesia, apalagi total kredit usaha rakyat yang diberikan pemerintah cukup besar dan ini bisa mendorong UMKM yang akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan, namun berdasrakan data angka kemiskinan tetap lah tinggi.
3. Jika dilihat dari kedua program yang sangat mendukung pengurangan

angka kemiskinan di indonesia, harusnya angka kemiskinan di indonesia bisa menurun dan angkanya kemiskinannya rendah, namun dari data angka kemiskinan masih terbilang cukup tinggi sekitar 24 hingga 30 lebih juta jiwa bahkan mengalami kenaikan di tahun 2015. Jadi berdasarkan data tersebut kemungkinan program PKH dan KUR ini kurang berjalan dengan baik dalam mengatasi kemiskinan. Padahal jelas dikatakan bahwa kedua program ini adalah program yang dibuat pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, namun dari data masih menunjukkan angka kemiskinan yang cukup tinggi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik mengambil judul **Pengaruh Anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2011-2019.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada variabel Anggaran PKH, pada data menunjukkan bahwa anggaran PKH selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa PKH merupakan salah satu program yang dibuat pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Berdasarkan teori ini jelas bahwa anggaran PKH sangat mendukung dalam mengatasi atau mengurangi kemiskinan. Namun angka kemiskinan masih terbilang cukup tinggi di indonesia dari tahun 2011-2019 sekitar 24 hingga 30 lebih juta jiwa atau sekitar 9% hingga mencapai 12% lebih. Dari data kemiskinan masih menunjukkan angka kemiskinan penduduk Indonesia yang sangat tinggi. Berdasarkan data juga bisa dilihat bahwa tahun 2015 angka kemiskinan naik menjadi 28.51 juta jiwa atau naik sekitar 11.13%. angka ini lebih tinggi dari angka sebelumnya 10.96%.
2. Pada variabel Kredit Usaha Rakyat (KUR), pada data menunjukkan bahwa total kredit yang disalurkan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini cukup tinggi dari 458.16 Triliun Rupiah pada tahun 2011 hingga tahun 2019 mencapai 1098.14 Triliun rupiah.

Seharusnya ini berdampak pada pengurangan kemiskinan, namun angka kemiskinan tahun 2015 terjadi peningkatan.

3. Dan jika dilihat dari kontribusi kedua variabel, harusnya kontribusi pada KUR dan PKH dapat menurunkan angka kemiskinan di tahun 2015, namun ini tidak. Dan angka kemiskinan di Indonesia tidak begitu berkurang, angka kemiskinan masih terbilang cukup tinggi padahal Anggaran PKH dan KUR sudah begitu banyak. Namun angka kemiskinan tetap sekitar 9 persen hingga 12 persen lebih.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu pada penelitian ini hanya membahas tentang data PKH dan total Kredit Usaha Rakyat yang diberikan serta data Penduduk miskin di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Anggaran PKH berpengaruh terhadap Kemiskinan Di Indonesia?
2. Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh terhadap Kemiskinan di Indonesia?
3. Apakah ada pengaruh Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara simultan terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun?

E. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan Penelitian Ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh anggaran PKH terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2011-2019
2. Untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2011-2019
3. Untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara simultan terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 2011-2019

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis yang dapat disimpulkan peneliti adalah sebagai berikut:

- a) Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- b) Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang perlunya program PKH dan Program KUR dalam mengatasi kemiskinan
- c) Dapat memberikan gambaran tentang pentingnya besaran anggaran dana yang diberikan dalam menanggulangi kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

a) Bagi Peneliti

Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang perekonomian dan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Kemiskinan dan sekaligus sebagai tugas akhir dalam perkuliahan di UINSU fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

b) Bagi Pembaca

Bagi pembaca penelitian dapat menambah bahan pustaka terkait dengan pengaruh Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap kemiskinan dan dapat juga sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya

c) Bagi Akademik

Bagi akademik, ini bisa sebagai bahan untuk menambah informasi dan sebagai referensi dalam menyusun karya ilmiah selanjutnya untuk fakultas ekonomi dan bisnis islam

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) miskin adalah tidak berharta benda, serba kekurangan, papa, sangat melarat.¹ Dalam bahasa Inggris, miskin adalah *poor* atau dapat diartikan *sebagai having a money few possession; not having enough money for the basic thing that people need to live properly*, yang diartikan tidak memiliki cukup uang untuk hal-hal dasar bahwa orang perlu untuk hidup dengan benar(layak).²

Kemiskinan menurut Bank Dunia dapat diartikan sebagai kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, tempat tinggal, ketidakmampuan mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan sehingga tidak memperoleh pekerjaan menyebabkan ketakutan akan masa depan, ketidakberdayaan dan tidak bebas dalam memenuhi keingnanya.

Teori Kemiskinan pada umumnya bermuara pada 2 paradigma besar yang juga berpengaruh pada pemahaman mengenai kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Dua paradigma itu adalah sebagai berikut:

a. Paradigma Neo-Liberal

Pada paradigma ini individu dan mekanisme pasar bebas menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan. Pendekatan ini menempatkan kebebasan individu sebagai komponen penting dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam melihat kemiskinan, pendekatan ini memberikan penjelasan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang merupakan akibat dari pilihan-pilihan individu.

b. Paradigma Demokrasi Sosial

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan VII, Edisi IV*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 581.

² Stevenson, *Oxford Dictionary of English*, (United States of America; Oxford University Press, 2010), h.366.

Paradigma ini tidak melihat kemiskinan sebagai persoalan individu melainkan lebih melihatnya sebagai persoalan struktural. Bagi pendekatan ini tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu menjadi penyebab terjadinya kemiskinan.³

Program penanggulangan kemiskinan adalah program yang disiapkan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan melalui bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, berbasis pemberdayaan masyarakat dan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.⁴ Hal ini dijelaskan juga oleh pendapat Purwanto bahwa program kemiskinan yang dilakukan lebih banyak mengalami kegagalan daripada keberhasilan, hal ini disebabkan banyaknya kendala dalam implementasi program pengentasa kemiskinan.⁵ Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Selain itu kemiskinan dapat dikelompokkan dalam empat terminology, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relative, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.

Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidak mampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimumnya seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimumnya di terjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang dan minimum kebutuhan dasar yang dikenal sebagai istilah garis kemiskinan. Oleh karena itu, penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Sebagai mana yang terdapat pada QS. Al-Mulk/67:15

³Yani Afdillah, Isnaini Harahap, dan Marliyah, *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan Pada Masyarakat Tebing Tinggi*, (Medan: Febi Uinsu Press, 2015), h. 45

⁴ Muhammad Iqbal Bahua, *Tinjauan Analisis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Dalam Mengatasi Kemiskinan*. (Kota Semarang : BAPEDA 2013), h. 24

⁵ Purwanto, Erwan Agus, *Implementasi Kebijakan Publik konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gava Media, 2012), h.13

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥٦﴾

Artinya : Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.⁶

Maksud ayat diatas adalah bahwa mencari nafkah dengan bekerja keras merupakan senjata utama untuk mengentasi kemiskinan. Ia adalah sarana pokok untuk memperoleh kekayaan serta merupakan faktor dominan dalam memakmurkan dunia. Islam memberikan motifasi yang mendorong gairah kerja dan berusaha, secara menggugah kesadaran untuk bepergian di atas permukaan bumi ini.

Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia No 166 Tahun 2014, yang dimaksud dengan program pengentasan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk mensejahterakan ,asyrakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lainnya dalam meningkatkan program ekonomi.⁷

Tinjauan yang sama dengan dengan penjelasan berbeda dikemukakan Nugroho dan Dahuri, dari aspek ekonomi, kemiskinan merupakan kesenjangan antara lemahnya daya pembelian (positif) dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar (normatif). Dari aspek sosial, kemiskinan mengindikasikan potensi perkembangan masyarakat yang rendah. Sedangkan dari aspek politik, kemiskinan berhubungan dengan rendahnya kemandirianmasyarakat.⁸

Berdasarkan definisi kemiskinan dari para ahli dan lembaga-lembaga terkait, secara umum kemiskinan dapat diartikan kondisi dimana tidak

⁶Mahmud Junus, *Tajamah Quran Karim*, (Bandung: Alma'arif, 1983), h. 508

⁷Peraturan Presiden Republik Indonesia No 166 Tahun 2014, *Tentang Pengentasan Kemiskinan*

⁸ Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah- Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, (Jakarta : Pustaka LP3ES , 2004) hlm. 166

terpenuhinya hak-hak dasar individu atau sekelompok orang sesuai standar kelayakan yang ditetapkan meliputi sandang, pangan, papan, bekerja dan memperoleh pendapatan, pendidikan, kesehatan, rasa aman terhadap ancaman, kebebasan berpendapat, dan hal-hal lain yang dapat mengembangkan dirinya. Pemaparan diatas memunculkan paradigma baru dalam memahami kemiskinan yang dulu kemiskinan hanya berhubungan dengan kebutuhan yang bersifat materi seperti makana, pakaian, dan perumahan maka saat ini kemiskinan mencakup berbagai dimensi seperti kesehatan, pendidikan, politik, ekonomi, dan spiritual.

2. Dimensi dan Indikator Kemiskinan

Dimensi dan Indikator kemiskinan sangat penting, hal ini diperlukan untuk menentukan program dan sasaran program pengentasan kemiskinan agar sesuai dengan target kemiskinan. Berdasarkan Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota, lembaga riset SMERU 2016, kriteria pengukuran kemiskinan yang banyak digunakan oleh pemerintah untuk menentukan sasaran program pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut:⁹

a. Pendekatan Kebutuhan Dasar (basic need approach)

Badan Pusat Statistik dalam menghitung angka kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*). Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang kemudian batasan dari sisi pengeluaran inilah disebut sebagai Garis Kemiskinan.

Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran

⁹Kertas Kerja SMERU, *Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota*, The SMERU Research Institute, (September, 2016), h 6.

kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.400 kilo kalori per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan minyak dan lemak, dll).

Ke- 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin. Sementara, garis kemiskinan Non-makanan (GKMN) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan yang diambil berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

a. Headcount Index

Headcount Index digunakan untuk mengukur kebutuhan absolut yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan non makanan (non food line).¹⁰

Ukuran garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS berdasarkan pendekatan kemiskinan absolut diukur dengan menghitung jumlah penduduk yang memiliki pendapatan perkapita yang tidak mencukupi untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang nilainya ekuivalen.¹¹

b. Index Kedalaman Kemiskinan (*Proverty Gap Index*)

Merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai index, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

¹⁰Yarlina Yacoub “ *Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Barat,*” (Jurnal Ekonomi Sosial), Vol 8, No 3 Oktober 2012, h 177-178.

¹¹Nunung Nurwati, “ *Kemiskinan Model Pengukuran, Permasalahan dan alternatif Kebijakan.*” (Jurnal Kependudukan Padjajaran), vol 10, no 1, Januari 2008, h,3.

c. Index Keparahan Kemiskinan (poverty Severity Index)

Memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai index, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Ada tiga dimensi yang menjadi ukuran kemiskinan MPI yaitu pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Adapun penjabaran dari tiga dimensi tersebut sebagai berikut:

1) Dimensi kesehatan

Dimensi Kesehatan diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu gizi dan kematian anak. Dimana kesehatan merupakan bagian dari kesehatan dasar yang mutlak diakses oleh rumah tangga. Indikator lain dari dimensi kesehatan adalah kematian anak. Secara filosofi kesehatan, adanya anak yang meninggal merupakan cerminan dari ketidakmampuan terhadap kesehatan. Bisa saja kematian tersebut akibat penyakit atau kekuranggizi.

2) Dimensi Pendidikan

Ada dua indikator dalam mengukur dimensi pendidikan yaitu lama sekolah (*years of schooling*) dan akses terhadap pendidikan (*attendance of school*). Dua indikator ini lebih mencerminkan kepada kemampuan masyarakat terhadap akses dasar pendidikan dan bukan mencerminkan kualitas dari pendidikan yang mereka dapati. Lama pendidikan dalam MPI dihitung minimal ada satu orang dalam rumah tangga yang telah menyelesaikan pendidikan minimal lima tahun. Sedangkan kehadiran anak di sekolah dihitung keberadaan anak usia sekolah yaitu kelas satu sampai delapan yang dalam pendidikan.

3) Dimensi Standart Hidup

Standar hidup dapat mencerminkan pola kehidupan keseharian dari masyarakat. Kemiskinan akan menjadikan masyarakat tidak dapat memenuhi kualitas standard dari kehidupan sesuai dengan MDGs. Indikatornya terdiri dari enam indikator. Pertama adalah air, di mana

seseorang memiliki akses terhadap air minum bersih jika sumber air salah satu jenis berikut: pipa air, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung, dilindungi semi atau air hujan, dan itu dalam jarak 30 menit berjalan kaki (pulang pergi). Jika gagal untuk memenuhi kondisi tersebut, maka rumah tangga dianggap kekurangan dalam akses terhadap air. Kedua, sanitasi. Seseorang dianggap memiliki akses ke sanitasi, jika rumah tangga memiliki beberapa jenis toilet atau jamban, atau berventilasi baik. Jika rumah tangga tidak memenuhi kondisi tersebut, maka dianggap kekurangan dalam sanitasi. Ketiga, listrik yaitu seseorang dianggap miskin jika tidak memiliki akses listrik. Keempat lantai rumah dimana jika bahan lantai terbuat dari tanah, pasir atau kotoran dianggap miskin. Kelima, bahan bakar untuk memasak yaitu seseorang dianggap miskin bila dalam bahanbakar memasak, rumah tangga tersebut menggunakan arang atau kayu. Keenam, kepemilikan asset apabila rumah tangga tidak memiliki lebih dari satu radio, TV, telepon, sepeda, sepeda motor atau kulkas, dan tidak memiliki mobil maka dianggap miskin.

Dari pemaparan teori diatas dapat dibuat tabel dimensi dan indikator Kemiskinan multidimensi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Dimensi dan Indikator Kemiskinan

No	Dimensi	Indikator
1	Kesehatan	Gizi
		Kematian Bayi
2	Pendidikan	Lama Sekolah
		Kehadiran dalam Pendidikan
3	Standar Hidup	Bahan bakar memasak
		Sanitasi
		Air bersih
		Sumber Penerangan
		Kondisi lantai rumah

	Kepemilikan asset
--	-------------------

Sumber: Dirangkum dari Berbagai Sumber (diolah 2020)

B. Program Pengentasan Kemiskinan

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 166 tahun 2014, yang dimaksud program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.¹²

Menurut Rito Yendriwalis, program pengentasan kemiskinan merupakan suatu unit atau kesatuan rancangan atau rencana kegiatan mengenai proses, cara, perbuatan mengangkat atau mengeluarkan atau menyadarkan atau memperbaiki hal, keadaan, atau situasi tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dankecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.¹³ Selanjutnya menurut beliau unit atau kesatuan rancangan atau rencana kegiatan tersebut dilakukan bukan hanya satu kali melainkan berkesinambungan dan berlangsung dalam kurun waktu relative lama. Hal ini merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, sertamasyarakat.¹⁴

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan program kemiskinan adalah rangkaian kegiatan baik berupa bantuan sosial atau pemberdayaan

¹²Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 166 tahun 2014, tentang pengentasan kemiskinan

¹³ Rito Yendriwalis, *Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau : Studi Kasus Pada Kegiatan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Kota Tanjung Pinang*, Naskah Publikaksi (Tanjung Pinang : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2015), h.18

¹⁴ ⁷*Ibid*

yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan terus menerus dan berkesenambungan untuk menciptakan kehidupan yang layak bagi masyarakat lemah.

Untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan peraturan presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari peraturan presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan. Dalam Perpres tersebut dinyatakan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Adapun beberapa macam program-program penanggulangan kemiskinan yang dibuat pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang kita kenal adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. PKH juga merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/ atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin, dengan memberdayakan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.¹⁵

Landasan Hukum Pemberian PKH :

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional

¹⁵Hari Harjanto Setiawan, *Kewirausahaan Sosial Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi*, Jakarta: Puslitbang Kementerian Sosial RI, 2020), h. 1

- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- c) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- d) Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 Tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- e) Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).¹⁶

2. Penerima PKH

Adapun kriteria penerima bantuan PKH adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria Komponen Kesehatan
 - 1) Ibu hamil, maksimal dua kali kehamilan
 - 2) Anak usia 0 sampai 6 tahun, maksimal 2 anak
- b. Kriteria Komponen Pendidikan
 - 1) Anak Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat
 - 2) Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat
 - 3) Anak Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau sederajat.
 - 4) Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
- b. Kriteria Komponen Kesejahteraan Sosial
 - 1) Lanjut usia mulai 60 tahun ke atas, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga
 - 2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat,

¹⁶Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, *Kajian Program Keluarga Harapan*, (Buku, Tidak diterbitkan)

maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga.

Seluruh keluarga berhak mendapat bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya. Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut pengurus keluarga. Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh para keluarga. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaan pada program-program pemerintah lainnya.

3. Hak Peserta PKH

Adapun hak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebagai berikut:

- a) Menerima bantuan tunai
- b) Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskesmas, Posyandu, Polindes, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

a. Hubungan Anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kemiskinan

Program Keluarga Harapan (PKH) dari hasil pengujian yang dilakukan terbukti bahwa PKH sangat berpengaruh dalam mengatasi kemiskinan. Itu memberikan arti bahwa dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan dengan sangat baik oleh pemerintah dan seluruh unsur yang terkait dapat membantu menanggulangi kemiskinan.

Adapun pengaruh PKH terhadap keluarga miskin adalah:

- a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok
- b. Peningkatan Kualitas Kesehatan

c. Pemenuhan Pendidikan Dasar bagi Anak¹⁷

Berdasarkan penelitian april juga telah diteliti bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) mempengaruhi pengentasan kemiskinan 8.3%. hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah membuat aspek pendidikan dan aspek kesehatan melalui Program Keluarga Harapan dalam mengatasi kemiskinan dan itu menunjukkan bahwa kemiskinan berkurang 8.3%.¹⁸

4. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit dari Rp 5 Juta sampai dengan Rp 500 Juta. Kredit usaha Rakyat (KUR) juga merupakan fasilitas kredit yang diberikan untuk usaha produktif dalam bentuk kredit modal kerja dan kredit investasi dengan jangka waktu kredit yang diberikan Bank. Bantuan berupa fasilitas pinjaman modal ini adalah :

- a. Untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lain yang bersifat informal.
- b. Mempercepat pengembangan sektor riil
- c. Pemberdayaa UMKM¹⁹

Program ini merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan dinilai berhasil jika mampu menurunkan jumlah penduduk miskin dibandingkan tahun-tahun

¹⁷Munawwarah Sahib, *Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*, Dalam Tesis Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alaudin, 2016, h. 100

¹⁸Aprilia Saraswati, *Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018, h. 101

¹⁹Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*, (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jeneral Informasi dan Komunikasi Publik, 2011), h.19-22

sebelumnya.²⁰ Manfaat program KUR adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor produktif kepada pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing UMKM.

Usaha mikro kecil merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. UMKM (Usaha, Mikro Kecil dan Menengah) dapat dimasukkan kedalam kategori ekonomi rakyat, namun bukan berarti bahwa sebagian besar kegiatan ekonomi rakyat tidak dapat disebut sebagai usaha atau perusahaan seperti yang dikenal dalam ilmu ekonomi perusahaan. Usaha mikro kecil adalah sebuah sektor usaha yang dijalankan oleh masyarakat kecil, memiliki jumlah yang sangat besar kuantitas, dikelola secara tradisional, sebagian besar tidak memiliki legalitas sehingga pekerja-pekerjanya tidak memperoleh perlindungan yang memadai dari sisi perundang-undangan dan dianggap sebagai sektor ekonomi yang tidak memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.²¹

Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah melakukan relaksasi kebijakan terkait KUR khususnya pada sektor penyaluran, kriteria penerima KUR, dan jenis penyaluran KUR, beberapa regulasi terkait Relaksasi KUR antara lain:

1. Permenko 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksana Kredit Usaha Rakyat yang memuat beberapa relaksasi kebijakan yaitu:
 - a. penambahan sektor yang dibiayai
 - b. Perluasan penerima KUR
 - c. Pembiayaan investasi untuk tanaman keras
 - d. Penambahan jangka waktu
 - e. Suplesi
 - f. Dan restrukturisasi KUR mikro dan KUR Ritel

²⁰Djonet Santoso, *Penduduk Miskin Transien: Masalah Kemiskinan Yang Terabaikan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 16

²¹Isnaini Harahap, *Analisis Dampak Penerapan Perbankan Syariah Terhadap Sektor UMKM Di Sumatera Utara*, Disertasi, Program Doktor Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016, h. 76

2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM No. 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Pinjaman KUR
3. Penguatan Basis Data SIKP dengan dukungan Kementerian Teknis, Pemda, dan TNP2K

Pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menetapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro. Bantuan ini ditujukan untuk pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau Ibu Rumah Tangga (IRT) yang menjalankan usaha produktif. Dalam skema KUR Super Mikro, yang menjadi agunan pokok ialah usaha atau proyek yang dibiayai KUR dan tidak diperlukan agunan tambahan. Pekerja terkena PHK dan ibu Rumah Tangga yang mempunyai usaha dapat memperoleh KUR Super Mikro dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memiliki Usaha dengan skala mikro.
- b. Lama usaha calon penerima KUR Super Mikro tidak dibatasi, namun bila usahanya kurang dari enam bulan harus memenuhi persyaratan, diantaranya mengikuti program pendampingan formal atau informal, tergabung dalam suatu kelompok usaha atau memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha.
- c. Bagi pegawai PHK tidak diwajibkan memiliki usaha minimal tiga bulan dengan pelatihan tiga bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) No.8 Tahun 2019 Tentang KUR, tapi dapat kurang dari 3 bulan.
- d. Belum pernah menerima KUR.

Pemerintah juga menetapkan tambahan subsidi bunga KUR dari yang sebelumnya sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya.²²

²² Husen Miftahuddin, <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/gNQGOEak-syarat-penerima-bantuan-kur-super-mikro/> diunduh tgl. 1/2/2021 Pkl. 8.30 AM

a. Hubungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Kemiskinan

KUR adalah suatu upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dengan mendorong perbankan dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Dan hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mantri KUR PT. BRI (persero) Unit Rappocini yang mengatakan bahwa KUR mampu mendorong pengembangan usaha mikro dan efektif dalam penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan berawal dari kurangnya modal yang dapat diakses untuk melakukan kegiatan usaha. Akibatnya produktivitas rendah dan berdampak pada rendahnya pendapatan. Menurut Todaro dan Smith, salah satu strategi yang layak dilakukan untuk memberantas kemiskinan adalah dengan membantu penduduk miskin mengembangkan usaha mikro. Dan anggaran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa membantu dalam meningkatkan modal kerja atau modal usaha.²³

C. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang telah ada. Untuk penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian

²³ Taufiq Catur Priambodo, *Analisis Pengaruh Kredit Usaha Mikro, Kredit Usaha Kecil, Derajat Pendidikan, dan Derajat Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan*, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, h. 33

Winda Jayanti (2018), Skripsi	Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Desa Pasar X Kecamatan Kuntalimbaru Kabupaten Deli Serdang	Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan menggunakan uji regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh dari PKH terhadap kesejahteraan keluarga di desa Pasar X Kecamatan Kuntalimbaru Kabupaten Deli serdang	Berdasarkan hasil perhitungan korelasi dengan menggunakan rumus Product Moment dengan responden 60 orang diperoleh r_{xy} dengan r_{tabel} terdapat korelasi antara variabel program keluarga harapan dengan kesejahteraan keluarga di desa pasar X Kecamatan Kuntalimbaru Kabupaten Deli Serdang, dimana diperoleh r tabel $= 0.254$ yang menyatakan $r_{xy} > r_{tabel}$, serta mempunyai hubungan yang kuat.
----------------------------------	---	--	--

Ake Lintang Samudra (2019), Jurnal	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit UMKM Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Indonesia	Dalam penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan analisis regresi data panel. Sumber data berupa data sekunder.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Total Kredit untuk UMKM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. hal ini ditunjukkan dengan hasil variabel total kredit UMKM memiliki nilai koefisien - 0.0616 dengan nilai probabilitas 0.00
Tutik Yuliyani (2018), Skripsi	Analisis Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Kota Kalimantan Timur Tahun 2008-2015	Alat analisis yang di gunakan adalah regresi linear berganda yang di terapkan untuk data <i>Cros- sektion</i> dan uji badan pendapatan rata-rata	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial hanya variabel PDRB yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi

			kalimantan Timur tahun 2008-2015 hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung>t tabel dan probabilitas <a5%, sedangkan variabel tingkat pengangguran , indeks Pembangunan manusia tidak berpengaruh.
--	--	--	---

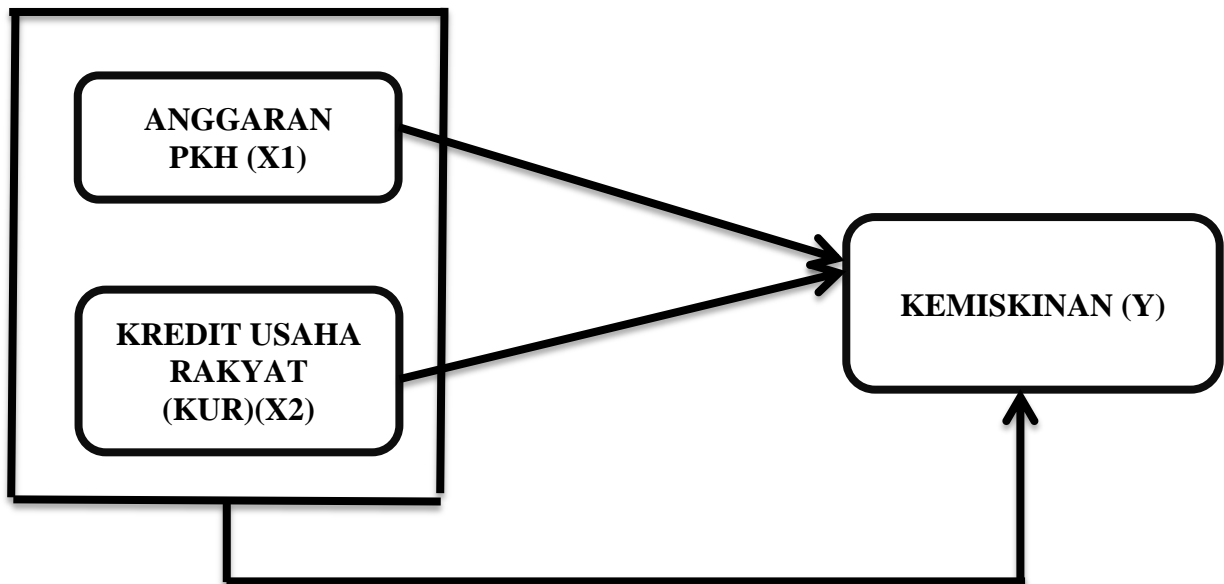
D. Kerangka Pemikiran

Untuk dapat mempermudah kegiatan penelitian dari awal perencanaan, pelaksana sampai dengan penyelesaian akhir, maka peneliti mencoba menggambarkan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan alur berfikir dan penalaran peneliti yang mendasarkan proses penelitiannya pada teori-teori yang berlaku. Pengembangan kerangka pemikiran atau kerangka teoritis bersifat sangat sentral karena seluruh substansi (teori, variabel, metode) dan proses di dalam kerangka pemikiran tersebut.

Kerangka pemikiran juga dapat diartikan sebagai suatu konstruksi yang didasarkan pada penalaran. Kerangka pemikiran berfungsi mengkerangka alur penelitian yang dieskpresikan di dalam bab tersendiri agar segala proses penelitian, pengujian hipotesa dan pengambilan kesimpulan lebih mudah.²⁴

²⁴Widartor Rachbini dan Didik Rachbini , *Metode Riset Ekonomi dan Bisnis*, (Buku, Tidak Diterbitkan), h. 52

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Maksud dari kerangka diatas adalah bahwa Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat berpengaruh terhadap kemiskinan. Anggaran PKH merupakan salah satu program yang dibuat pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, begitupun Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga merupakan program dalam memberantas kemiskinan melalui aspek UMKM yang memberikan pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam membuat usaha sehingga dapat menambah pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan.

E. Hipotesis

Hipotesa adalah jawaban sementara atas penelitian yang masih mengandung kemungkinan benar atau salah. Bentuk hipotesis dapat berbentuk pernyataan ataupun matematis tergantung pada penelitian yang dilakukan.²⁵ Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. H01 : Anggaran PKH tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan

²⁵Azhari Akmal Tarigan, et.,all, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, (fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU), h.18

Ha1 : Anggaran PKH berpengaruh terhadap Kemiskinan

2. H02 : Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan

Ha2 : Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh terhadap Kemiskinan

3. H03 : Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan

Ha3 : Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh terhadap Kemiskinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Untuk adapat melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial dijabarkan dalam beberapa komponen masalah, variabel dan indikator. Dan setiap variabel yang ditentukan diukur dengan menggunakan simbol-simbol angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut.

Jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Dimana deskriptif analisis merupakan penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data.¹ Maksud dari bersifat deskriptif karena penelitian ini menggambarkan pengaruh anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Kemiskinan Di Indonesia yang memecahkan masalah dengan menggunakan data-data. Dalam penelitian ini menggambarkan apa adanya tentang hal-hal yang berkenaan dengan Pengaruh Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Kemiskinan Di Indonesia.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa tempat/lokasi yang nyata maka, data tidak akan dapat diperoleh oleh penulis. Dan dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian yaitu Indonesia. Dan objek penelitian bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin dan Total Kredit serta darai Kementerian Sosial (KEMENSOS) yaitu Anggaran PKH. Data ini telah

¹Selli Imaniar, “*Pengaruh Investasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h.43-44

dikumpulkan sejak tahun 2019.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sampel. Maksudnya adalah karena yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keseluruhan atau data total. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Jumlah Penduduk Miskin, Anggaran PKH dan Total Kredit yang masing-masing berjumlah 9 dari tahun 2011-2019. Dan dalam penelitian ini akan dilakukan interpolasi data dengan menggunakan *Eviews* 8. Dimana interpolasi data adalah perubahan dari bentuk tahunan ke data triwulan atau kuartal.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara pengambilan sampel jenuh. Sampel jenuh adalah sampel yang mewakili jumlah populasi. Biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100. Alasan pemilihan sampel jenuh ini adalah karena data dalam penelitian ini menggunakan data *time series* yang diambil masing-masing berjumlah 9 dari data tahunan. Karena data yang diperoleh hanya 9 tahun, sedangkan dalam penelitian skripsi minimal harus ada 30, maka akan dilakukan interpolasi data menjadi kuartalan maka $9 \times 4 = 36$ sehingga total data menjadi 36. Interpolasi adalah perubahan data dari bentuk tahunan ke triwulan atau kuartal.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh instansi terkait / pihak lain). Penelitian ini menggunakan data *time series* tahunan periode 2011-2019. Data tahunan ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan

Kementerian Sosial (KEMENSOS), yaitu:

1. Data Anggaran PKH = www.berkas.dpr.go.id (Sumber: Kemensos)
2. Data Total Kredit = www.bps.go.id
3. Data Jumlah Kemiskinan = www.bps.go.id

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Oleh karena itu teknik penelitian yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi

Menurut Danial studi dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, data siswa, data penduduk; grafik, gambar, surat-surat, foto, akte, dsb.²

Sugiyono mengatakan bahwa “dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan”. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi dokumentasi untuk mendapatkan data-data resmi dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial.

2. Studi Pustaka

Danial dan Warsiah menjelaskan bahwa, studi literatur adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah

² Ibit.h. 79

buku-buku, majalah, liflet, yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian”. Teknik ini penulis gunakan dalam penelitian yang penulis lakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevandengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini studi literatur dilakukan dengan membaca buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu tentang kemiskinan, pengentasan kemiskinan dan juga tentang maqashid syariah dan kearifan lokal. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data toritis yang sekiranya dapat mendukung kebenaran data yang diperoleh melalui penelitian.

F. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah penjelasan tentang cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur dan mengoperasionalkan construct menjadi variabel penelitian yang dapat dituju. Definisi operasional variabel juga didefinisikan sebagai suatu definisi yang didasrkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya dari orang lain.³

Adapun variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen

Merupakan variabel bebas yang menjadi sebab terpengaruhnya dengan variabel terikat. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah: Anggaran PKH (X1) dan KUR (X2)

2. Variabel Dependen

Merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kemiskinan (Y).

Untuk mempermudah dan memperjelas definisi dari masing-masing

³Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h. 54

variabel, peneliti mencoba membuat tabel seperti tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Anggaran PKH (X1)	Dana bantuan dari pemerintah melalui program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditepkan	Indikatornya dilihat dari besaran dana anggaran yang disalurkan kepada masyarakat miskin. Adapun perhitungan menggunakan analisis deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yaitu dengan rumus: $P = \frac{f}{n} \times 100\%$	Nominal
KUR (X2)	suatu upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dengan mendorong perbankan dalam menyalurkan kredit kepada UMKM	Dana total Kredit yang dipinjamkan oleh pihak perbankan untuk membantu masyarakat miskin Rumus : <u>Realisasi Kredit $X_n - X_{(n-1)}$</u> Realisasi Kredit $X_{(n-1)}$	Nominal
Kemiskinan (Y)	kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, tempat tinggal, ketidakmampuan mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan sehingga tidak mepumemperoleh pekerjaan	Indikator dari kemiskinan adalah pendapatan yang rendah, dilihat dari pendidikan, kesehatan, perumahan.	Nominal

	menyebabkan ketakutakan akan masa depan, ketidakberdayaan dan tidak bebas dalam memenuhi keingnanya.		
--	--	--	--

G. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari Website atau situs resmi BPS, Kementerian Sosial, dan dari berbagai situs berita, penelitian terdahulu, jurnal-jurnal dan lain-lain. cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, membuat tabulasi frekuensi data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan analisis, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian kuantitatif ini, analisa yang digunakan berupa model (*ex.*Matematika) dengan hasil yang disajikan berupa angka-angka yang kemudian dijelaskan atau diinterpretasikan dalam satu uraian.⁴ Setelah data telah tersedia, maka hal selanjutnya menganalisis data. Menganalisis data ini menggunakan metode statistik. Adapun cara peneliti menganalisis data ini menggunakan teknik pengolahan *Eviews* 8. Teknik ini digunakan untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada diidentifikasi masalah.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data dan menganalisis data agar pihak lain dapat mengetahui gambaran objek dari penelitian tersebut. Ini dibuat dengan tujuan agar bisa menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antar variabel.

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴Azhari Akmal Tarigan, et.al., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Medan: La-Tansa Press, 2012), h.90

a. Uji Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Analisis deskriptif ini dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif. Uji statistik dalam analisis deskriptif ini bertujuan untuk menguji hipotesis dari penelitian yang bersifat deskriptif.⁵

b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah uji statistik untuk mengukur sejauhmana sebuah model regresi dapat disebut sebagai model yang baik. Adapun langkah-langkah dalam uji asumsi klasik terdiri atas:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model penelitian. Uji normalitas dikatakan normal jika nilai signifikansi yang dihasilkan > 0.05 maka distribusi datanya dikatakan normal. Dan sebaliknya jika nilai signifikansinya yang dihasilkan < 0.05 maka dapat dikatakan bahwa data tidak terdistribusi dengan normal.⁶

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini digunakan untuk melihat apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Dan sebuah model regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas.

Adapun kriteria pengujian multikolinearitas dilihat dari nilai

⁵Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 126

⁶Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: Febi Press, 2016), h.

tolerance adalah:

- a. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0.10 maka dapat diartikan tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji
- b. Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0.10 maka dapat diartikan terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji.

Adapun kriteria pengujian multikolinearitas dilihat dari VIF (*Variance Inflation Factor*) adalah:

- a. Apabila nilai VIF lebih kecil dari 10.00 maka terjadi multikolinearitas
- b. Apabila nilai VIF lebih besar dari 10.00 maka tidak terjadi multikolinearitas⁷

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas adalah uji yang dilakukan peneliti dengan tujuan mencari tau apakah data tersebut bebas dari heterokedastisitas atau tidak yaitu variasi nilai yang berubah/ tidak konstan. Apabila uji ini menghasilkan hasil perhitungan dari masing-masing variabel menunjukkan level sig > 0.05 maka artinya penelitian tersebut terbebas dari heterokedastisitas dan layak untuk diteliti. Dan apabila nilai sig < 0.05 maka ini artinya terkena heterokedastisitas dan tidak layak untuk diteliti.⁸

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi yaitu salah satu uji yang dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson (*Durbin Watson Test*), dengan dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka tidak terdapat autokorelasi

⁷*Ibid.*, h. 105

⁸*Ibid.*, h. 98

- b. Apabila d terletak antara dU dan (4-DU) maka tidak terjadi autokorelasi
- c. Apabila d terletak antara dL dan dU atau (4-dL) dan (4-dU) maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.
- d. Dengan keterangan:

T : Jumlah sampel (n)

K : Jumlah Variabel Independen

dL : Batas atas

dU : Batas bawah⁹

b. Regresi Linear Berganda

Metode regresi linear berganda adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Manfaat dari regresi linear berganda adalah analisis regresi ini lebih akurat dalam melakukan analisis korelasi. Analisa regresi linear berganda juga dikatakan analisis yang memiliki variabel bebas lebih dari satu. Regresi berganda merupakan regresi dengan dua atau lebih variabel $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ sebagai variabel bebas (*Independen*) dan variabel Y sebagai variabel terikat (*Dependen*), nilai-nilai koefisien atau taksiran parameter regresi berganda dapat diperoleh dengan model Regresi Linear Berganda.¹⁰ Adapun persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan: Y : Kemiskinan

α : Koefisien Konstanta

⁹ *Ibid.*, h. 101

¹⁰Kurnia Sandi, et.al., *Tutorial PHP Machine Learning Menggunakan Regresi Linear Berganda Pada Aplikasi Bank Sampah Istimewa Versi 2.0 Berbasis WEB*, (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020), h. 45

b_1, b_2 : Koefisien Regresi

X_1 : Anggaran PKH

X_2 : Kredit Usaha Rakyat (KUR)

e : Error, Variabel Gangguan

a. Uji Hipotesis

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Adapun uji statistik adalah sebagai berikut:

1. Uji Parsial/ Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghazali, uji parsial ini digunakan untuk dapat mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen. Uji statistik t atau yang disebut uji parsial digunakan untuk dapat mengetahui tujuan tersebut maka selanjutnya yaitu membuat hipotesis dengan variabel penjelas (X) secara individu menjelaskan variabel terikat (Y).

- a) Berdasarkan nilai Signifikansi (Sig) < 0.05 maka pengaruh X terhadap Y dan H_0 ditolak, namun jika nilai signifikansi (Sig). $> Probabilitas\ 0.05$ maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y dan H_1 diterima.

2. Uji Simultan/ Serentak / Uji Statistik F

Menurut Ghazali, uji statistik F adalah uji yang menunjukkan semua variabel bebas dimasukkan dalam model yang memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Pengujian uji F ini dilakukan menggunakan *Level Of Significant* sebesar 5% ($\alpha = 0.05$) dengan kebebasan derajat $df = (n-k-1)$ dimana n adalah jumlah responden dan k merupakan jumlah

variabel.

Pembuktian ini dilakukan apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka model regresi fit dan apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai signifikansi dalam statistik $F > 0.05$ maka model tersebut regresi tidak fit.¹¹

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui ketetapan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam mewakili kelompok data hasil observasi, dan perlu dilihat sampai seberapa jauh model yang terbentuk dapat menerangkan kondisi yang sebenarnya.

Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 1, berarti garis regresi yang terbentuk cocok secara sempurna dengan nilai-nilai observasi yang diperoleh. Artinya dalam hal nilai koefisien determinasi sama dengan satu berarti ragam naik turunnya Y seluruhnya disebabkan oleh X . Dengan demikian jika nilai X diketahui, nilai Y dapat diramalkan secara sempurna. Nilai koefisien determinasi adalah dari 0-1.¹²

¹¹Ubaidilah, *Pengaruh Profitabilitas dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018*, (Penerbit Kabayas, 2020), h. 38

¹²Dergibson Siagian Sugiarto, *Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 259

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Indonesia dan kemiskinan di Indonesia

Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6° 08' Lintang Utara dan 11° 15' Lintang Selatan dan antara 94° 45'-141° 05' Bujur Timur dan dilalui oleh garis kahtulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°.

Berdasarkan dari letak geografisnya, kepulauan Indonesia berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Menurut posisi geografisnya, Negara Indonesia memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara : Negara Malaysia, Singapura, Filiphina, dan Laut
China Selatan
- a. Selatan : Negara Australia, dan Samudera Hindia
- b. Barat : Samudera Hindia
- c. Timur : Negara Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudera
Pasifik

Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terletak di lima pulau besar dan tiga kepulauan, yaitu:

- a. Pulau Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi
Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung.
- b. Kepulauan di Sumatera: Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka
Belitung
- c. Pulau jawa: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, dan Jawa Timur
- d. Kepulauan Nusa Tenggara (Sunda Kecil): Bali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur

- e. Pulau Kalimantan: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara
- f. Pulau Sulawesi: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
- g. Kepulauan Maluku: Maluku dan Maluku Utara
- h. Pulau Papua: Papua dan Papua Barat

Gambar 4.1

Peta Indonesia



Kemiskinan di Indonesia berdasarkan data yang telah didapat dan juga dalam BPS telah dijelaskan bahwa segala program telah dijalankan dalam menurunkan angka kemiskinan. Angka kemiskinan turun sejak tahun 2011 sampai 2013 maret, dan kembali meningkat pada tahun 2013 september, namun tahun 2014 maret dan september hingga 2015 maret angka kemiskinan turun dan kembali meningkat 2015 september. Pada maret 2012 jumlah orang miskin di Indonesia tercatat 29,25 juta atau 11,96%. Kemudian periode maret 2013 jumlah orang miskin di Indonesia

sebanyak 28,17 juta atau 11,36%. Pada maret 2014 jumlah penduduk miskin tercatat 28,28 juta atau 11,25%. Lalu pada maret 2015 jumlah orang miskin 28,59 juta atau 11,22%. Maret 2016 sebanyak 28,01 juta atau 10,86%, 2017 maret penduduk miskin tercatat 27,77 juta atau 10,46% dan pada maret 2018 jumlah penduduk miskin tercatat 25,95 juta atau 9,82%.¹ Berdasarkan data BPS sudah tertera jelas walaupun terjadi penurunan angka kemiskinan, namun angka kemiskinan masih terbilang cukup tinggi padahal program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan, namun hanya bisa menurunkan kemiskinan sekian persen. Dan itupun masih ada yang mengalami peningkatan angka kemiskinan salah satunya tahun 2015. Padahal program pengentasan kemiskinan sudah dijalankan sejak tahun 1998.

1. Kependudukan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Dunia. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 yang berjudul Statistik Indonesia 2018 (*Statistical Yearbook Of Indonesia 2018*). Jumlah penduduk indonesia 261.890.900 Jiwa yang tersebar di 34 Provinsi.

Gambar 4.2

Jumlah Penduduk di Indonesia



¹Sylke Febrina Laucereno, *Ini Data Kemiskinan RI 5 Tahun Terakhir Menurut BP*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4138150/ini-data-kemiskinan-ri-5-tahun-terakhir-menurut-bps/> diakses tgl. 19/3/2021/ pkl. 2.36 Wib

Pada 2017, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai hampir 262 juta jiwa. Berdasarkan Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2019 sebanyak 267 juta. Sedangkan Berdasarkan laporan Bappenas dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 jumlah penduduk Indonesia untuk tahun 2019 diproyeksikan meningkat ke 269,6 juta jiwa. Dan pada 2035 jumlah penduduk Indonesia akan menembus 300 juta.²

2. Kondisi Pendidikan

Adapun kondisi pendidikan di Indonesia yang peneliti dapat dari situs resmi atau website resmi BPS adalah bahwa persentase penduduk usia 7-24 tahun untuk jenis kelamin laki-laki di tahun 2018 yang sekolah sebanyak 70.39 persen, dan ditahun 2019 meningkat menjadi 70.45 persen. Namun persentase yang tidak bersekolah atau belum pernah sekolah yaitu 0.65 persen di tahun 2018 dan hanya turun sedikit ditahun 2019 yaitu menjadi 0.63 persen. Sedangkan untuk persentase yang tidak sekolah lagi juga terbilang ada sekitar 28.96 persen di tahun 2018 dan ditahun 2019 ada sekitar 28.92 persen. Sedangkan untuk jenis kelamin perempuan sedikit berbeda dengan laki-laki. Di tahun 2018 persentase yang masih sekolah dalam kelompok perempuan ada sebanyak 71.04 persen lebih tinggi dari laki laki. Dan untuk kategori yang tidak pernah sekolah ada sekitar 0.60 persen. Dan yang tidak sekolah lagi ada sekitar 28.36 persen. Di tahun 2019 yang bersekolah sebanyak 71.10 persen, yang tidak bersekolah atau yang belum pernah sekolah sebanyak 0.52 persen. Sedangkan yang tidak sekolah lagi meningkat menjadi 28.38 persen.³

Berdasarkan *International Student Assessment* (PISA) posisi Indonesia berada di papan bawah peringkat pendidikan dunia dan tertinggal dari

² Databoks, *Berapa Jumlah Penduduk Indonesia?*,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/12/berapa-jumlah-penduduk-indonesia>,
 diunduh tgl 15/1/2021, pk1 7.34 AM

³ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Persentase Anak Sekolah Usia 7-24*,
<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1533/persentase-penduduk-usia-7-24-tahun-menurut-jenis-kelamin-kelompok-umur-sekolah-dan-partisipasi-sekolah-1-2002-2020.html>/
 tgl.31/01/2021 Pkl. 21.00 Wib

negara Brunei dan Malaysia. Indonesia mendapat angka 371 dalam hal membaca 379 untuk matematika dan 396 terkait ilmu pengetahuan. Artinya disini sistem pendidikan belum inklusif dan akses pendidikan masih terbatas.⁴

3. Kondisi Kesehatan

Kondisi kesehatan di Indonesia juga bisa diukur dengan banyaknya rumah sakit atau puskesmas yang ada di Indonesia. Berdasarkan data profil Kesehatan Kementerian Kesehatan jumlah puskesmas di Indonesia sebanyak 9.993 unit pada 2018. Dan dari jumlah itu, sebanyak 3.623 unit (36%) sudah mempunyai layanan rawat inap. Dan Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah puskesmas terbanyak yakni mencapai 1.069 unit. Kemudian diikuti oleh Jawa Timur 967 unit dengan urutan kedua dan Jawa Tengah 881 unit dengan urutan ketiga. Jumlah penduduk yang sangat banyak di ketiga provinsi itu membutuhkan sarana kesehatan yang banyak juga.

Dan berdasarkan Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia pada 2018, rasio puskesmas di Indonesia perkecamatan adalah 1,39. Dan kalau dikerucutkan untuk setiap provinsi, penyebaran puskesmas tidak merata. Tercatat bahwa masih 17 provinsi di Indonesia yang mempunyai rasio puskesmas per kecamatan dibawah rasio nasional.⁵

4. Ekonomi Masyarakat Indonesia

Kegiatan ekonomi masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa. Di Indonesia kegiatan ekonomi masyarakat beragam. Ada yang bersifat agraris dan non agraris. Adapun jenis kegiatan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Pertanian

Yaitu kegiatan produksi yang menggunakan tanah sebagai

⁴Portal Islam, *Peringkat Pendidikan Indonesia di Posisi Bawah, Lebih Rendah Dari Malaysia dan Brunei*, <https://www.portal-islam.id/2019/12/menyedihkan-peringkat-pendidikan.html>, di unduh tgl 16/1/2021/pkl 1.38 Wib

⁵Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/12/berapa-jumlah-puskesmas-di-indonesia/> diunduh tgl 15/02/2021/ Pkl. 6.39 AM

faktor utama. Hasilnya tersebut adalah makanan. Pertanian banyak menjadi mata pencaharian bagi masyarakat Indonesia

b. Perkebunan

Perkebunan biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis. Dimana digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar

c. Kemudian peternakan dan perikanan, kegiatan peternakan seperti menjual hasil ternak seperti telur, ayam dll. Sedangkan perikanan seperti pengelolaan dan pemanfaatan ikan. Seperti penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pertambakan.

d. Kemudian perdagangan, perindustrian, pertambangan dan jasa.

B. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan dari keadaan wilayah analisi. Sebelum data dianalisis, peneliti mengubah data time series menjadi kuartalan dengan menggunakan *evIEWS 8*. Adapun hasil kuartalannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Quartal

	Kemiskinan (Y)	Anggran PKH (X1)	KUR (X2)
2011Q1	30.01	1.282	458.16
2011Q2	29.685	1.45325	475.22
2011Q3	29.36	1.6245	492.28
2011Q4	29.035	1.79575	509.34
2012Q1	28.71	1.967	526.4
2012Q2	28.6825	2.35925	547.3075
2012Q3	28.655	2.7515	568.215
2012Q4	28.6275	3.14375	589.1225
2013Q1	28.6	3.536	610.03

2013Q2	28.3825	4.039	625.4525
2013Q3	28.165	4.542	640.875
2013Q4	27.9475	5.045	656.2975
2014Q1	27.73	5.548	671.72
2014Q2	27.925	5.77875	688.74
2014Q3	28.12	6.0095	705.76
2014Q4	28.315	6.24025	722.78
2015Q1	28.51	6.471	739.8
2015Q2	28.3225	6.802	769.09
2015Q3	28.135	7.133	798.38
2015Q4	27.9475	7.464	827.67
2016Q1	27.76	7.795	856.96
2016Q2	27.465	8.68125	878.3175
2016Q3	27.17	9.5675	899.675
2016Q4	26.875	10.45375	921.0325
2017Q1	26.58	11.34	942.39
2017Q2	26.3525	12.83425	964.9525
2017Q3	26.125	14.3285	987.515
2017Q4	25.8975	15.82275	1010.0775
2018Q1	25.67	17.317	1032.64
2018Q2	25.45	21.58775	1049.015
2018Q3	25.23	25.8585	1065.39
2018Q4	25.01	30.12925	1081.765
2019Q1	24.79	34.4	1098.14
2019Q2	24.57	38.67075	1114.515
2019Q3	24.35	42.9415	1130.89
2019Q4	24.13	47.21225	1147.265

Sumber: *Eviews 8*

Dari data diatas peneliti mencari analisis deskripsinya seperti tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Deskripsi Penelitian

	KEMISKINAN (Y)	Anggaran PKH (X1)	KUR (X3)
Mean	27.34139	12.05349	800.0883
Median	27.93625	6.9675	783.735
Maximum	30.01	47.21225	1147.265
Minimum	24.13	1.282	458.16
Std. Dev.	1.612174	12.41551	216.7652
Skewness	-0.514519	1.528459	0.058373
Kurtosis	2.144274	4.264514	1.680173
Jarque-Bera	2.68678	16.41562	2.63336
Probability	0.260959	0.000273	0.268024
Sum	984.29	433.9255	28803.18
Sum Sq. Dev.	90.96863	5395.075	1644550
Observations	36	36	36

Sumber: *Eviews 8*

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai mean atau rata-rata anggaran PKH yaitu 12.0534 triliun rupiah. Nilai maksimum pada Anggran PKH adalah 47.2122 triliun rupiah. Sedangkan nilai paling minimum pada anggaran PKH adalah 1.282 triliun rupiah.

Pada nilai mean atau rata rata dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah 800.0883 triliun rupiah dan nilai median dari KUR ini adalah 783.735 triliun rupiah. Nilai maksimum dari KUR ini adalah 114.265 triliun rupiah dan nilai minimumnya adalah 458.16 triliun rupiah.

Kemudian, nilai mean atau rata-rata dari Kemiskinan adalah 27.341 juta jiwa dan nilai median dari kemiskinan adalah 27.936 juta jiwa. nilai

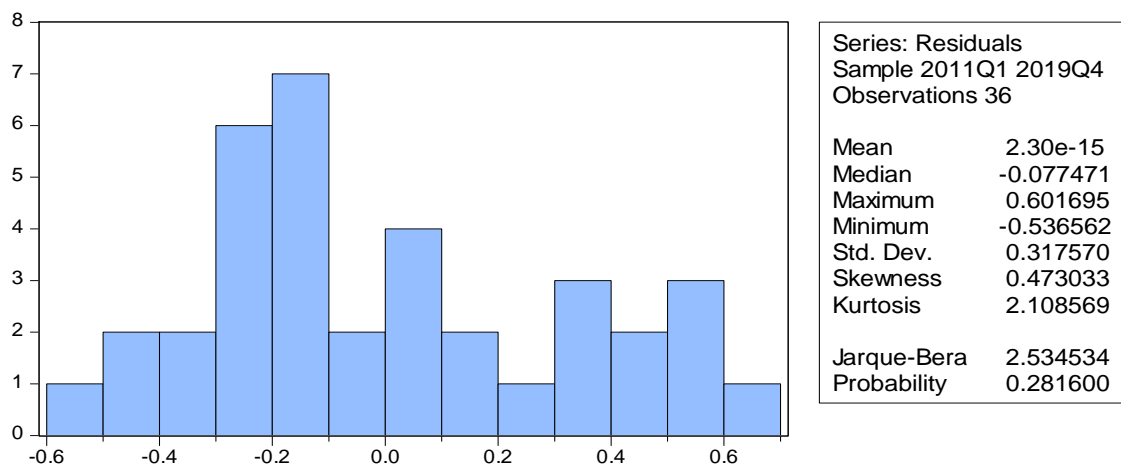
maksimum atau nilai paling tinggi pada kemiskinan adalah 30.01 juta jiwa dan nilai minimum atau yang nilai yang paling rendah dari kemiskinan adalah 24.13 juta jiwa.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Gambar 4.3

Uji Normalitas



Sumber: *Eviews 8*

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa nilai probability sebesar $0.28 > 0.05$, dan dapat disimpulkan bahwa data residula dalam model terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Adapun hasil uji multikolinearitas yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.100518	33.83096	NA
Anggaran PKH (X1)	7.52E-05	7.469027	3.792422

KUR (X2)	2.47E-07	56.93563	3.792422
----------	----------	----------	----------

Sumber : *Eviews 8*

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan, didapat hasil bahwa nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) berada dibawah 10.00 yaitu $3.79 < 10.00$ yang menandakan bahwa kedua variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas ini digunakan untuk mencari tahu apakah data terbebas dari heterokedastisitas atau tidak. Adapun hasil uji heterokedastisitas disini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Uji Heterokedastisitas

F-statistic	2.304729	Prob. F(2,33)	0.1156
Obs*R-squared	4.412201	Prob. Chi-Square(2)	0.1101
Scaled explained SS	2.054996	Prob. Chi-Square(2)	0.3579

Sumber: *Eviews 8*

Berdasarkan hasil uji *heterokedastisitas* yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai *Prob. Chi Square* keduanya menunjukkan hasil $0.11 > 0.05$ dan $0.35 > 0.05$, artinya bahwa penelitian ini terbebas dari heterokedastisitas dan layak untuk diteliti.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa uji ini digunakan untuk memastikan apakah penelitian ini terbebas dari autokorelasi. Dalam penggunaan *Eviews* ada banyak cara dalam menguji autokorelasi salah satunya menggunakan *Durbin Watson (Durbin Watson Test)*. Dari hasil diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.045020	0.156034	0.288524	0.7749
X1_PKH	0.002066	0.004357	0.474177	0.6387
X2_KUR	-8.38E-05	0.000246	-0.340625	0.7357
RESID(-1)	1.244684	0.159599	7.798799	0.0000
RESID(-2)	-0.462099	0.163559	-2.825270	0.0082
R-squared	0.781104	Mean dependent var	2.30E-15	
Adjusted R-squared	0.752859	S.D. dependent var	0.317570	
S.E. of regression	0.157874	Akaike info criterion	-0.725789	
Sum squared resid	0.772653	Schwarz criterion	-0.505856	
Log likelihood	18.06421	Hannan-Quinn criter.	-0.649027	
F-statistic	27.65488	Durbin-Watson stat	1.785175	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: *Eviews 8*

Berdasarkan ouput diatas, didapat hasil DW adalah sebesar 1.806, selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan tabel Durbin Watson dengan tingkat sig sebesar 5%, dengan jumlah sampel $N = 36$ dan jumlah variabel independen 2 ($K=2$). Dari tabel DW maka diperoleh nilai $du = 1.587$.

Nilai DW 1.785 lebih besar dari nilai $du + 1.587$ dan kurang dari $4 - 1.587 = 2.413$, artinya dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi.

D. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda antara variabel independen dan dependen. Variabel dependen dalam

penelitian ini adalah Kemiskinan (Y). Sedangkan yang menjadi variabel independen adalah Anggaran PKH (X1) dan KUR (X2). Hasil *estimasi* model penelitian output regresi linear berganda (*Multiple regression linear*) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Hasil Regresi Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31.61489	0.317046	99.71713	0.0000
X1_PKH	-0.05239	0.008671	-6.04229	0.0000
X2_KUR	-0.00455	0.000497	-9.16534	0.0000
R-squared	0.961198	Mean dependent var		27.34139
Adjusted R-squared	0.958846	S.D. dependent var		1.612174
S.E. of regression	0.327051	Akaike info criterion		0.682256
Sum squared resid	3.529766	Schwarz criterion		0.814216
Log likelihood	-9.28061	Hannan-Quinn criter.		0.728314
F-statistic	408.7357	Durbin-Watson stat		0.223654
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: *Eviews 8*

Berdasarkan tabel diatas, metode analisisnya menjadi:

$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$ dimana hasilnya adalah:

Kemiskinan = $31.641 - 0.05239X_1 - 0.00455X_2$, dimana penjelasannya adalah:

- a. Konstanta $\alpha = 31.641$

Konstanta bernilai positif, artinya jika Anggaran PKH (X_1) dan KUR (X_2) tidak ada atau sama dengan nol, maka kemiskinan akan semakin bertambah 31.641. Hasil ini memiliki makna bahwa semakin sedikit anggaran PKH dan KUR maka kemiskinan akan semakin bertambah.

- b. Koefisien regresi anggaran PKH (X_1) = -0.05239

Artinya apabila Anggaran PKH meningkat sebesar 1%, maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 52,39%. Koefisien regresi yang didapat bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Anggaran PKH dengan kemiskinan. Hasil ini memiliki makna bahwa semakin tinggi Anggaran PKH yang diberikan maka Kemiskinan akan semakin berkurang.

- c. Koefisien regresi KUR (X_2) = - 0.00455

Artinya apabila KUR meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 45,5%. Koefisien regresi yang didapat bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan kemiskinan. Hasil ini memiliki makna bahwa semakin tinggi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan maka Kemiskinan akan semakin berkurang.

E. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial/ Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji ini digunakan untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen, dimana jika nilai Signifikansi (Sig) < 0.05 maka variabel X memiliki pengaruh signifikan terhadap Y dan H_0 ditolak, namun jika nilai signifikansi (Sig). > Probabilitas 0.05 maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y dan H_1

diterima.

Adapun dari hasil pengujian yang dilakukan, didapat hasil sebagai berikut:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31.61489	0.317046	99.71713	0.0000
X1_PKH	-0.05239	0.008671	-6.04229	0.0000
X2_KUR	-0.00455	0.000497	-9.16534	0.0000
R-squared	0.961198	Mean dependent var		27.34139
Adjusted R-squared	0.958846	S.D. dependent var		1.612174
S.E. of regression	0.327051	Akaike info criterion		0.682256
Sum squared resid	3.529766	Schwarz criterion		0.814216
Log likelihood	-9.28061	Hannan-Quinn criter.		0.728314
F-statistic	408.7357	Durbin-Watson stat		0.223654
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: *Eviews 8*

- Anggaran PKH diperoleh nilai probabilitas $0.00 < 0.05$ maka artinya Anggaran PKH memiliki pengaruh yang signifikan bagi kemiskinan.
- Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperoleh hasil uji parsial menunjukkan nilai probabilitas juga $0.00 < 0.05$ maka artinya Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki pengaruh yang signifikan bagi kemiskinan.

2. Uji Simultan/ Serentak/ Uji Statistik F

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa uji F merupakan sebuah metode pengujian untuk mengetahui sejauh mana pengaruh atau hubungan variabel secara simultan (keseluruhan) yaitu antara variabel X1, dan X2 terhadap variabel Y. Biasanya dalam penelitian dan pengolahan data dijumpai nilai F hitung > F tabel maka hipotesis alternatif H_a diterima dengan *level of signifikansi* atau $\alpha = 5\%$.

Dari hasil regresi yang didapat peneliti menunjukkan hasil sebagai berikut:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31.61489	0.317046	99.71713	0.0000
X1_PKH	-0.05239	0.008671	-6.04229	0.0000
X2_KUR	-0.00455	0.000497	-9.16534	0.0000
R-squared	0.961198	Mean dependent var		27.34139
Adjusted R-squared	0.958846	S.D. dependent var		1.612174
S.E. of regression	0.327051	Akaike info criterion		0.682256
Sum squared resid	3.529766	Schwarz criterion		0.814216
Log likelihood	-9.28061	Hannan-Quinn criter.		0.728314
F-statistic	408.7357	Durbin-Watson stat		0.223654
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: *Eviews 8*

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh F statistik sebesar 408.7357 dengan nilai probabilitas statistiknya 0.000000. Sedangkan F tabel $df_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$ sedangkan $df_2 = n - k = 36 - 3 = 33$. Maka F statistik $>$ F tabel yaitu $408.7357 > 3.28$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Artinya secara bersama-sama Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara simultan berpengaruh terhadap variabel kemiskinan dengan nilai probabilitas $0.00 < 0.05$. Artinya bahwa variabel kemiskinan terhadap Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sesuai dan memiliki arti.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31.61489	0.317046	99.71713	0.0000
X1_PKH	-0.05239	0.008671	-6.04229	0.0000
X2_KUR	-0.00455	0.000497	-9.16534	0.0000
R-squared	0.961198	Mean dependent var		27.34139
Adjusted R-squared	0.958846	S.D. dependent var		1.612174
S.E. of regression	0.327051	Akaike info criterion		0.682256
Sum squared resid	3.529766	Schwarz criterion		0.814216
Log likelihood	-9.28061	Hannan-Quinn criter.		0.728314
F-statistic	408.7357	Durbin-Watson stat		0.223654
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: *Eviews 8*

Berdasarkan hasil diatas diperoleh nilai R^2 sebesar 0.9588 yang berarti besarnya pengaruh dari variabel Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 0.9588 atau 95.88% sementara sisanya yaitu sebesar 4.12% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

F. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa dari hasil interpretasi model, Koefisien regresi yang didapat bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Anggran PKH dengan kemiskinan. Hasil ini memiliki makna bahwa semakin tinggi Anggran PKH yang diberikan maka Kemiskinan akan semakin menurun sebesar 52,3 persen di Indonesia. Selain dari hasil koefisien regresi, nilai probabilitas yang didapat juga lebih kecil dari toleransi kesalahan. Nilai probabilitas yang didapat $0.00 < 0.05$, artinya Anggaran PKH berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian April dimana hasilnya menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Pekon Pandasurat. Hasil yang didapat PKH memperoleh nilai signifikansi $0.014 < 0.05$ dengan nilai koefisien regresi -0.191.⁶

Selanjutnya hasil interpretasi pada Kredit Usaha Rakyat (KUR), Koefisien regresi yang didapat juga bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan kemiskinan. Hasil ini memiliki makna bahwa semakin tinggi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan maka Kemiskinan akan semakin menurun sebesar 45,5 persen di Indonesia. Selain dari hasil koefisien regresi, nilai probabilitas yang didapat juga lebih kecil dari toleransi kesalahan. Nilai probabilitas yang didapat $0.00 < 0.05$,

⁶Aprilia Saraswati, *Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Daam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 101

artinya Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

Hal ini juga sesuai dengan penelitian Ilmiati Iztiyar, bahwa Kredit Usaha Rakyat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini ditandai dengan nilai koefisien regresi -0.1957. nilai koefisien regresinya bernilai negatif artinya semakin tinggi anggaran PKH maka kemiskinan turun - 0.1957 di Sumatera Barat. Dan nilai probabilitas yang diperoleh lebih kecil dari 0.05 artinya KUR berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.⁷

Kemudian hasil analisis pada Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menunjukkan hasil F statistik > F tabel, artinya hipotesis ditolak jadi secara bersama-sama Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat secara simultan berpengaruh terhadap variabel kemiskinan. Hal ini juga ditandai dengan nilai probabilitas $0.00 < 0.05$ yang artinya bahwa variabel kemiskinan terhadap Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sesuai dan memiliki arti. Hasil R^2 sebesar 0.9460 yang berarti bahwa variabel dependen kemiskinan dan variabel independen Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dikategorikan memiliki hubungan linear yang sangat kuat. Besarnya pengaruh dari variabel Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 0.9460 atau 94.60% sementara sisanya yaitu sebesar 5.4% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian Aprilia juga mengatakan bahwa program PKH telah membantu mengurangi kemiskinan masyarakat 8.3% dan dengan adanya PKH ini pendidikan anak dan kesehatan keluarga lebih terjamin. Dan begitupun pada penelitian Ilmiati yang mengatakan bahwa dalam teori lingkaran kemiskinan mengatakan bahwa dengan adanya dana KUR dapat mengurangi tingkat kemiskinan. hal ini juga diperjelas dalam penelitian Ake Lintang Samudra yang mengatakan bahwa Variabel total kredit mendapat

⁷Ilmiati Iztiyar, *Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan, Pengembangan Usaha Kecil Dan Perekonomian Di Indonesia*, dalam Jurnal Ilmiah, Vo.6, No.2, 2018, h. 6

nilai koefisien -0.061 dengan nilai probabilitas 0.00. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin besar kredit yang disalurkan maka semakin kecil atau semakin berkurang kemiskinan. hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara total kredit dan jumlah penduduk miskin. Dan ini berarti adanya kesesuaian teori lingkaran kemiskinan. karena dengan adanya kredit yang diberikan perbankan untuk akan memberikan tambahan modal yang akan digunakan untuk menjalankan usaha dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga jumlah penduduk miskin turun.⁸

⁸Ake Lintang Samudra, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit UMKM Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Diindonesi*, Dalam Jurnal Ilmiah, 2019, h. 12

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menyatakan bahwa Anggaran PKH H0 ditolak artinya secara parsial Anggaran PKH berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan dalam penelitian bahwa adanya pengaruh Anggaran PKH dengan kemiskin. Artinya semakin meningkatnya Anggaran PKH yang diberikan maka akan berpengaruh menurunkan kemiskinan.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menyatakan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendapat hasil hipotesis H0 ditolak artinya secara parsial bahwa KUR berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Indonesia.
3. Berdasarkan hasil penelitian pada Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hipotesis ditolak, artinya bahwa Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menunjukkan hasil dimana secara bersama-sama Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Kemiskinan.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anggaran PKH merupakan salah satu program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. program ini sangat membantu terutama dalam pendidikan, seharusnya pemerintah lebih gencar menjalankan program ini agar masyarakat miskin yang kurang mampu dalam pendidikan masih bisa bersekolah dan harusnya dana Anggaran pada program ini harus lebih

ditingkatkan lagi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seperti hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa kontribusi PKH ini sangat berpengaruh dalam mengurangi kemiskinan. Hasil ini pun telah diperjelas dalam beberapa penelitian bahwa besarnya dana anggran PKH yang diberikan pemerintah akan mengurangi kemiskinan.

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga merupakan salah satu program yang paling dominan dalam mengurangi angka kemiskinan. Seperti yang diketahui bahwa dana kredit yang disalurkan bersumber dari perbankan. Dan besarnya dana anggaran yang diberikan pihak perbankan sangat berpengaruh dalam mengurangi kemiskinan, karena anggaran kredit ini membantu dalam mengembangkan UMKM. Dan dari UMKM inilah yang akan sangat membantu dalam mengurangi angka kemiskinan. Seharusnya dana Anggaran KUR yang diberikan pihak perbankan untuk masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi agar penurunan angka kemiskinan lebih optimal.
3. Anggaran PKH dan KUR yang telah disalurkan oleh pemerintah dan pihak perbankan kepada masyarakat, harusnya masyarakat juga harus lebih bisa menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang pasti seperti dana KUR yang diberikan perbankan harus digunakan untuk membuka usaha mikro kecil menengah apapun bentuk usahanya, kemudian dana anggaran PKH yang diberikan pemerintah harus digunakan dengan sebaik-baiknya agar kemiskinan ditengah masyarakat dapat berkurang.
4. Jika ada penelitian selanjutnya mengenai Anggaran PKH dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini maka harus lebih melihat seberapa jauh kedua program ini dalam menanggulangi kemiskinan, kalau bisa ditambah dengan kontribusi program lain agar lebih tergambar atau terukur seberapa jauh program program tersebut dalam menanggulangi kemiskinan dan bagaimana serta upaya apa aja yang dilakukan pemerintah pada program ini dalam menanggulangi kemiskinan untuk lebih jelasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Heri Susanto, *KUR*, <http://kur.ekon.go.id/pentingnya-keuangan-inklusif-dalam-pengentasan-kemiskinan-dan-pemerataan-ekonomi-melalui-kredit-usaha-rakyat-kur/> diunduh tgl 20/12/2020 Pkl. 07.00 WIB
- Afdillah, Yani Isnaini Harahap, dan Marliyah. *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan Pada Masyarakat Tebing Tinggi*, (Medan: Febi Uinsu Press. 2015.
- Ahmadi, Nur Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: Febi Press. 2016.
- Akmal, Azhari Tarigan, et.,all, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, (fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU)
- Akmal, Azhari Tarigan, et.al., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* . Medan: La-Tansa Press. 2012.
- Catur, Taufiq Priambodo. *Analisis Pengaruh Kredit Usaha Mikro, Kredit Usaha Kecil, Derajat Pendidikan, dan Derajat Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan*, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang. 2014.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, *Kajian Program Keluarga Harapan*, (Buku, Tidak diterbitkan)
- Saraswati, Aprillia *Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. 2018.
- Siagian, Dergibson Sugiarto, *Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*, .Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Gustika, Roza *Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Masyarakat Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman*, Dalam e-jurnal Apresiasi Ekonomi, ISSN: 2337- 3997, Vol 4 No.2. Maret 2016.
- Harahap, Isnaini *Analisis Dampak Penerapan Perbankan Syariah Terhadap Sektor UMKM Di Sumatera Utara*, Disertasi, Program Doktor

- Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2016.
- Harmain, Hendra Muhammad Ramadhan, dan Aqwa Naser Daulay. *Managemen Keuangan Keluarga Secara Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Nelayan Pesisir Pantai Indonesia*. Dalam Penelitian. 2019.
- <https://www.beritasatu.com/ekonomi/338515/ini-penyebab-angka-kemiskinan-ri-meningkat/> Diunduh tgl. 13/04/2021/ Pkl. 14.28 Wib
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/12/berapa-jumlah-penduduk-indonesia>, diunduh tgl 15/1/2021, pkl 7.34 AM
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/12/berapa-jumlah-puskesmas-di-indonesia/> diunduh tgl 15/02/2021/ Pkl. 6.39 AM
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/16/provinsi-mana-yang-memiliki-angka-kemiskinan-terbesar/>. diunduh tgl 28/1/2021 pkl. 23.35 WIB
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4138150/ini-data-kemiskinan-ri-5-tahun-terakhir-menurut-bps/> diakses tgl. 19/3/2021/ pkl. 2.36 Wib
- <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1533/persentase-penduduk-usia-7-24-tahun-menurut-jenis-kelamin-kelompok-umur-sekolah-dan-partisipasi-sekolah-1-2002-2020.html>/ diunduh tgl.31/01/2021 Pkl. 21.00 Wib
- <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/gNQGOEak-syarat-penerima-bantuan-kur-super-mikro/> diunduh tgl. 1/2/2021 Pkl. 8.30 AM
- <https://www.portal-islam.id/2019/12/menyedihkan-peringkat-pendidikan.html>, diunduh tgl 16/1/2021/pkl 1.38 Wib
- Imaniar, Selli “*Pengaruh Investasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*, (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenederal Informasi dan

Komunikasi Publik. 2011.

Kertas Kerja SMERU, *Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota*, The SMERU Research Institute. September. 2016.

Marliya. “ *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu*”
Jurnal Katalogis, Volume 1 Nomor2. Februari 2013

Muhammad Iqbal Bahua, *Tinjauan Analisis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Dalam Mengatasi Kemiskinan*. Kota Semarang : BAPEDA 2013.

Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media. 2020.

Nining I. Soesilo, *Keuangan Mikro Indonesia*, Jakarta: UKM Center FEUI. 2017.

Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah- Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Jakarta : Pustaka LP3ES .2004.

Nurwati, Nunung “ *Kemiskinan Model Pengukuran, Permasalahan dan alternatif Kebijakan.*” (Jurnal Kependudukan Padjajaran), vol 10, no 1. Januari 2008.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 166 Tahun 2014, *Tentang Pengentasan Kemiskinan*

Purwanto, Erwan Agus, *Implementasi Kebijakan Publik konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*, Yogyakarta : Gava Media. 2012.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan VII, Edisi IV*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. 2014.

Rachbini, Widarto dan Didik Rachbini , *Metode Riset Ekonomi dan Bisnis*, (Buku, Tidak Diterbitkan)

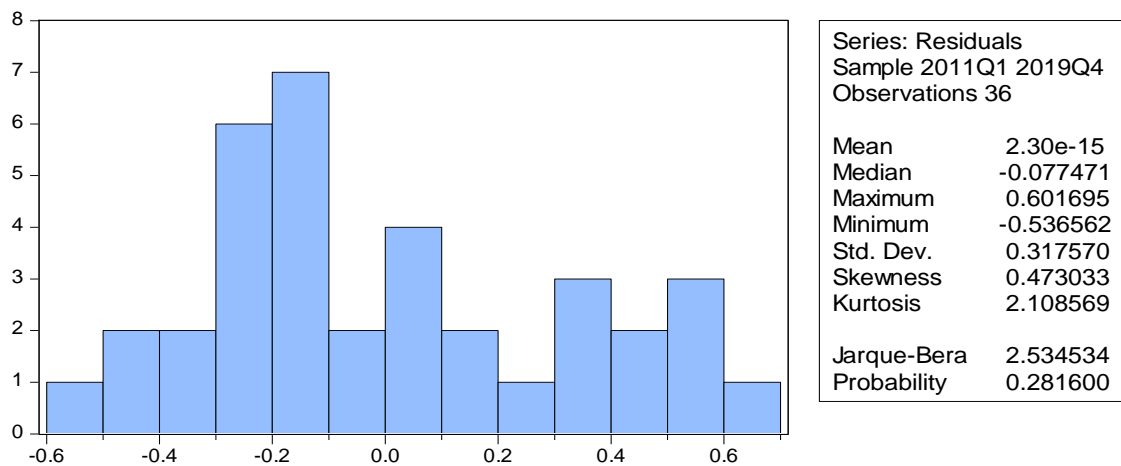
Sahib, Munawwarah *Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*, Dalam Tesis Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alaudin. 2016.

Sandi, Kurnia et.al., *Tutorial PHP Machine Learning Menggunakan Regresi*

- Linear Berganda Pada Aplikasi Bank Sampah Istimewa Versi 2.0 Berbasis WEB*, Bandung: Kreatif Industri Nusantara. 2020.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*, Jakarta: Kencana. 2013
- Stevenson, *Oxford Dictionary of English*, (United States of America; Oxford University Press. 2010
- Ubaidilah. *Pengaruh Profitabilitas dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018*, (Penerbit Kabayas. 2020.
- Yacoub, Yarlina. “ *Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Barat*,” (Jurnal Ekonomi Sosial), Vol 8, No 3 Oktober 2012.
- Yendriwalis, Rito *Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau : Studi Kasus Pada Kegiatan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Kota Tanjung Pinang*, Naskah Publikaksi (Tanjung Pinang : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. 2015.
- Zakiah, Kiki et.,all., *Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Kesejahteraan Sosial (lanjut Usia dan Disabilitas Berat Di Indonesia)*, dalam Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI. 2020.

Lampiran-Lampiran

Uji Normalitas



Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.100518	33.83096	NA
Anggaran PKH (X1)	7.52E-05	7.469027	3.792422
KUR (X2)	2.47E-07	56.93563	3.792422

Uji Heterokedastisitas

F-statistic	2.304729	Prob. F(2,33)	0.1156
Obs*R-squared	4.412201	Prob. Chi-Square(2)	0.1101
Scaled explained SS	2.054996	Prob. Chi-Square(2)	0.3579

Uji Autokorelasi

R-squared	0.781104	Mean dependent var	2.30E-15
Adjusted R-squared	0.752859	S.D. dependent var	0.317570

S.E. of regression	0.157874	Akaike info criterion	-0.725789
Sum squared resid	0.772653	Schwarz criterion	-0.505856
Log likelihood	18.06421	Hannan-Quinn criter.	-0.649027
F-statistic	27.65488	Durbin-Watson stat	1.785175
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31.61489	0.317046	99.71713	0.0000
X1_PKH	-0.05239	0.008671	-6.04229	0.0000
X2_KUR	-0.00455	0.000497	-9.16534	0.0000
R-squared	0.961198	Mean dependent var		27.34139
Adjusted R-squared	0.958846	S.D. dependent var		1.612174
S.E. of regression	0.327051	Akaike info criterion		0.682256
Sum squared resid	3.529766	Schwarz criterion		0.814216
Log likelihood	-9.28061	Hannan-Quinn criter.		0.728314
F-statistic	408.7357	Durbin-Watson stat		0.223654
Prob(F-statistic)	0.000000			